

STRATEGI SANITASI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Eddy Anhar¹, Nasruddin², Sahrul³, Try Sugiyarto Soeparyanto⁴, Ishak Kadir⁵

Universitas Haluoleo

e-mail: eddyanhar.ea@gmail.com¹, nas.afz78@gmail.com², sahrul.pasca2024@gmail.com³

Abstrak – Kabupaten Kolaka Utara telah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada tahun 2014 sebagai pedoman pembangunan sanitasi sektor selama periode 2015-2019. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, pemutakhiran SSK pada tahun 2021 menjadi sangat penting untuk merencanakan sanitasi pembangunan lima tahun ke depan yang sesuai dengan kondisi aktual dan tantangan baru. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi yang aman dan layak melalui perencanaan yang terintegrasi dengan kebijakan daerah, provinsi, dan nasional. Pemutakhiran dilakukan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) dengan pendekatan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi evaluasi kondisi yang ada, analisis kesenjangan, serta penetapan visi, misi, dan strategi pembangunan sanitasi. Hasil dari pemutakhiran ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dan melibatkan peran swasta serta masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencapaian akses sanitasi di Kolaka Utara masih memerlukan peningkatan yang signifikan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, termasuk mengurangi praktik buang air besar sembarangan (BABS). Strategi yang dirumuskan mencakup penguatan kelembagaan, optimalisasi infrastruktur pengolahan lumpur tinja, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi.

Kata Kunci: Strategi Sanitasi.

Abstract – North Kolaka Regency has prepared a District Sanitation Strategy (SSK) document in 2014 as a guideline for sector sanitation development during the 2015-2019 period. With the end of this period, updating the SSK in 2021 is very important for planning sanitation development for the next five years in accordance with actual conditions and new challenges. This document aims to increase coverage of safe and adequate sanitation services through planning that is integrated with regional, provincial and national policies. The update was carried out by the Housing and Settlement Areas Working Group (Pokja PKP) with a participatory approach. The methods used include evaluating existing conditions, analyzing images, as well as establishing a vision, mission and strategy for sanitation development. It is hoped that the results of this update will encourage cross-sector collaboration and involve the role of the private sector and the community, so as to optimize the management of domestic wastewater, solid waste and drainage. The results of the analysis show that achieving sanitation access in North Kolaka still requires significant improvement to achieve the 2020-2024 RPJMN target, including reducing the practice of open defecation (defecation). The strategy formulated includes strengthening institutions, optimizing faecal sludge processing infrastructure, and outreach to the community to strengthen awareness and participation.

Keywords: Sanitation Strategy.

PENDAHULUAN

Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2014 telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi. Pada tahun 2021 ini dokumen SSK perlu dimutakhirkan kembali untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan gambaran yang up to date dan rencana implementasi program akan lebih tepat sasaran. Kegiatan pemutakhiran dokumen SSK diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan kota, secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi sehingga mampu mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan sektor sanitasi yang sesuai dengan standar baik layak maupun aman.

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Kolaka Utara juga diupayakan agar dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor, agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain:

1. SSK Kabupaten Kolaka Utara merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan resmi yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, seperti RPJMD, RKPD.
2. Penyusunan SSK Kabupaten Kolaka Utara mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW tahun 2021 – 2030) Kabupaten Kolaka Utara, khususnya berkaitan dengan zonasi pembangunan sarana sanitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Wilayah

Kabupaten Kolaka Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis Kabupaten Kolaka Utara berada pada koordinat 02O00' –05O00' Lintang Selatan dan 120O45' –121O60' Bujur Timur, mencakup luas daratan dan pulau-pulau kecil seluas ± 3.391,62 Km². Selain itu, juga memiliki wilayah perairan laut membentang sepanjang Teluk Bone, seluas +12.376 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Kabupaten Luwu Timur

Timur: Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka

Barat: Perairan teluk bone

Selatan: Kabupaten Kolaka dan Perairan teluk bone.

Dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Kolaka Utara ini memiliki prospek pengembangan yang sangat strategis, karena selain berada pada jalur lintasan ekonomi regional (Jalan Trans Sulawesi) juga berbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah paling berkembang dan menjadi barometer kemajuan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Untuk wilayah Kabupaten Kolaka Utara ini akses terhadap wilayah Sulawesi Selatan dapat dicapai melalui dua alternatif moda transportasi, yaitu melalui jalur darat (Jalan Trans Sulawesi) dan jalur laut melalui Pelabuhan Tobaku di Lasusua dan Pelabuhan Sapoiha (Lapai) ke Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan bahwa intensitas pergerakan (barang maupun orang) ke wilayah Utara (Sulawesi Selatan) jauh lebih tinggi dibanding ke wilayah Selatan (Kendari).

Secara administratif, Kabupaten Kolaka Utara mempunyai luas 3.391,62 km² yang terbagi dalam 15 (Lima Belas) kecamatan dan 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Porehu dengan luas 647,23 km² atau 19,08.% dari luas Total Kabupaten Kolaka Utara.

Gambar 1. Peta



Peta wilayah administrasi kabupaten kolaka utara.

Data jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021 berdasarkan Satsatistik dalam angka berjumlah 139.306 jiwa dengan rincian Jumlah penduduk pedesaan sebanyak 74.111 Jiwa dan penduduk perkotaan sebanyak 65.195 dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4,53 Jiwa/Km¹

Table 4. jumlah penduduk, jumlah kelurahan dan luas wilayah terbangun.

Gambar 2. jumlah keluarga miskin (KK)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/desa		Luas terbangun (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan terbangun (jiwa/km ²)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Rantasingi	4	3	1184,4684	2.999	3.103	601	622	5,15
2	Lambi	5	2	1268,134	3.306	3.282	664	657	5,2
3	Wawo	3	4	5493,6376	2.751	4.139	551	830	1,25
4	Lasusua	4	8	5105,712	5.924	21.259	1.186	4.255	5,32
5	Kato	2	4	3190,034	1.873	5.073	376	1.017	2,18
6	Kodeoha	10	2	1400,7364	9.510	1.846	1.905	370	8,11
7	Tisu	3	4	668,7508	2.255	2.382	452	478	6,93
8	Ngapa	9	3	2753,55	10.341	7.210	2.072	1.443	6,37
9	Watunohu	4	4	552,9816	3.488	3.372	698	677	12,41
10	Pakue	9	2	2196,1584	6.179	2.293	1639	480	4,77
11	Pakue	6	3	2869,132	4.774	3.454	956	692	2,87
12	Pakue	9	1	2182,91	6.585	946	1.320	190	3,45
13	Batu Putih	8	3	3931,1288	5.028	3.512	1.008	704	2,17
14	Porehu	6	2	8305,1816	4.968	1.841	996	369	0,82
15	Tolata	4	2	3645,0516	2.136	1.480	428	298	0,99
Jumlah		85	47	44.742,6	74.111	65.195	14.844	13.053	4,53

Sumber: BPS Kab. Kolaka Utara Tahun 2021

Jumlah keluarga miskin (KK) Kabupaten Kolaka Utara sampai tahun 2021 telah mencapai 16.448 KK dengan jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat pada Kecamatan Lasusua sebanyak 2.245 KK. Berikut uraian jumlah penduduk miskin perkecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.

Table jumlah penduduk miskin perkecamatan.

Gambar 3. nama dan jumlah KK

Nama Kecamatan	Jumlah KK
Kecamatan Ranteangin	687
Kecamatan Lambai	884
Kecamatan Wawo	928
Kecamatan Lasusua	2.245
Kecamatan Kato	884
Kecamatan Kodeoha	1.183
Kecamatan Tiwu	653
Kecamatan Ngapa	1.795
Kecamatan Watunohu	704
Kecamatan Pakue	1.608
Kecamatan Pakue Utara	961
Kecamatan Pakue Tengah	1.055
Kecamatan Batuputih	1.286
Kecamatan Porehu	1.046
Kecamatan Tolala	529
Jumlah	16.448

Sistem permukiman perkotaan dan perdesaan pada dasarnya mencerminkan keadaan fungsi kawasan berdasarkan aktivitas ekonomi, akumulasi penduduk dan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan. Berdasarkan potensi dan kondisi yang ada, maka pada dasarnya pola pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan di Kolaka Utara dapat dikelompokkan atas:

- a. Kawasan untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian.

Dari kondisi dan potensi yang ada, maka kawasan-kawasan di Porehu, Pakue, Watunohu, Lambai, Wawo merupakan kawasan untuk pengembangan perkebunan dan pertanian. Untuk pengembangannya, dapat dilakukan pola sebagai berikut yaitu terdapat kawasan-kawasan (umumnya yang berada di wilayah perdesaan) yang difungsikan untuk menanam/memproduksi hasil perkebunan dan pertanian, terdapat pusat-pusat pelayanan/kegiatan yang ada di wilayah tersebut menjadi lokasi untuk mengumpulkan hasil perkebunan dan pertanian, para petani dapat menjual hasil perkebunannya ke pusat pelayanan/pusat kegiatan tersebut, di pusat pelayanan/pusat kegiatan ini pula, para petani dapat memperoleh keperluannya sehari-hari untuk aktivitasnya di perkebunan, seperti perolehan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan. Selanjutnya, proses pengumpulan hasil perkebunan ini dilanjutkan ke pusat pelayanan/pusat kegiatan yang mempunyai orde lebih tinggi, pusat pelayanan/pusat kegiatan ini menyediakan informasi yang bisa diakses oleh pusat pelayanan/pusat kegiatan dengan orde yang lebih rendah darinya, seperti informasi tentang teknologi perkebunan dan pertanian (dari mulai proses pengolahan lahan, pembibitan hingga pasca panen, serta pengetahuan tentang hama/penyakit tanaman), harga jual produk perkebunan, serta ketersediaan dan harga bibit unggul, pupuk dan obat-obatan, berbagai informasi yang diterima oleh kota-kota atau pusat pelayanan/pusat kegiatan tersebut harus dapat diakses pula oleh kawasan perdesaan di sekitarnya, mengingat keterbatasan infrastruktur yang ada, sebagai tahap awal, metoda dan alat yang dapat digunakan untuk kelancaran arus informasi tersebut bisa melalui siaran radio, penyuluhan, pelatihan, maupun selebaran.

- b. Kawasan untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan kehutanan.

wilayah Kolaka Utara yang dapat dimasukkan kedalam pengelompokan kawasan

pengembangan kegiatan perkebunan dan kehutanan adalah kawasan di Kecamatan Batu Putih, polanya sama dengan yang diberlakukan pada Kecamatan Porehu, Pakue, Watunohu, Lambai, Wawo dimana di kawasan perdesaan difokuskan untuk memproduksi hasil perkebunan dan kehutanan. Produknya dipasarkan ke kota-kota atau pusat pelayanan/pusat kegiatan yang mempunyai orde terendah, untuk selanjutnya dipasarkan ke kota-kota orde yang lebih tinggi. Untuk menjaga keberlangsungan kawasan hutan, maka perlu dilengkapi dengan upaya pencegahan dari kemungkinan penebangan liar/pencurian kayu/hasil hutan, pusat kegiatan/pusat pelayanan yang termasuk dalam kategori kota-kota orde lebih tinggi ini juga perlu menyediakan informasi yang bisa diakses oleh kota-kota orde terendah, yang selanjutnya informasi tersebut dapat diakses pula oleh kawasan perdesaan di sekitarnya dengan jenis informasi yang serupa.

c. Kawasan untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan pertambangan.

Kawasan Kecamatan Porehu, Batu Putih dan Pakue merupakan kawasan untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan pertambangan. Kawasan perdesaan di wilayah ini difungsikan untuk memproduksi hasil-hasil perkebunan dan pertambangan, dengan alokasi sebaran sesuai dengan potensinya. Konsep pengembangannya sama dengan yang diberlakukan pada kawasan untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian. Akan tetapi untuk wilayah ini, perlu ditambahkan suatu aturan/regulasi yang membatasi ruang gerak masing-masing aktivitas tersebut, sehubungan dengan adanya aktivitas penggalian dan penambangan. Aktivitas penambangan memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaannya supaya tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Teknologi yang digunakan (baik cara maupun bahan yang digunakan), dari mulai proses penambangan, pengolahan hasil tambang, hingga pasca tambang/reklamasi, harus yang bersifat ramah lingkungan.

d. Kawasan untuk pengembangan kegiatan kelautan dan perikanan.

Kegiatan kelautan dan perikanan dapat dikelompokkan atas perikanan laut dan perikanan darat. Melihat adanya kegiatan dan potensi yang dimiliki, maka kawasan-kawasan di Pakue, Lasusua, dan Porehu, Ngapa merupakan kawasan untuk pengembangan kegiatan kelautan dan perikanan. Kawasan di Pakue dan Lasusua lebih diprioritaskan bagi pengembangan kegiatan kelautan/perikanan laut, sedangkan Porehu dan Ngapa untuk perikanan darat. Sama seperti kawasan-kawasan terdahulu, maka disini juga terdapat pusat-pusat kegiatan/pelayanan orde terendah dan orde lebih tinggi dengan fungsi masing-masing.

e. Kawasan untuk pengembangan kegiatan perkotaan.

Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Kato'i merupakan kawasan untuk pengembangan kegiatan perkotaan seperti perdagangan, (jasa) industri, jasa dan pariwisata. Berbagai produk dari hasil perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan yang diproduksi di wilayah lainnya, yang telah terkumpul di kota-kota orde lebih tinggi selanjutnya diperdagangkan di kawasan ini, khususnya di pusat pelayanan/pusat kegiatan yang diklasifikasikan sebagai kota orde tertinggi. Kota orde tertinggi di Kabupaten Kolaka Utara ini menjadi outlet bagi tiap produk dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Produk-produk tersebut diperjual belikan di Kabupaten Kolaka Utara itu sendiri, dan juga sebagian untuk diekspor.

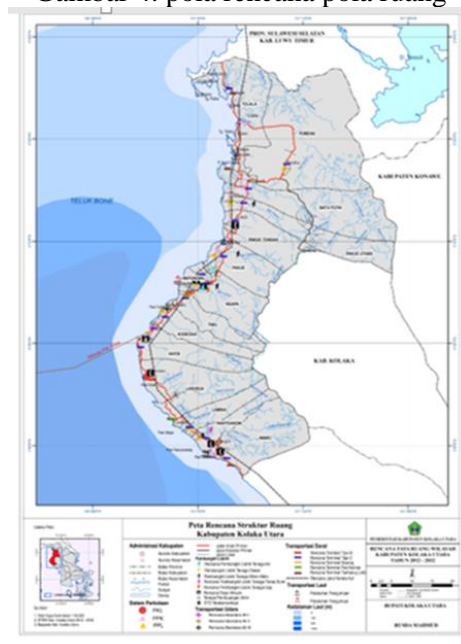
Saat ini di Kabupaten Kolaka Utara sudah didirikan 25 unit pasar dan 10 unit pelabuhan yang tersebar tidak merata. Untuk pasar, tersebar di semua kecamatan kecuali Kecamatan Watunohu. Untuk pelabuhan, hanya dibangun di 9 kecamatan, yaitu Batu Putih, Tolala, Pakue, Watunohu, Kodeoha, Kato'i, Lambai, Ranteangin, dan Wawo. Untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas industri pengolahan, maka pasokan bahan mentahnya perlu dijamin keberadaannya secara menerus.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas industri tersebut, antara lain yaitu melalui upaya intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan, penggunaan sistem tebang pilih dan tanam untuk Kawasan hutan, pengaman area hutan pertanian dan perkebunan dari kemungkinan longsor dan pencurian.

Aktivitas lainnya yang juga akan dikembangkan di kawasan Lasusua dan Kato'i ini adalah jasa dan pariwisata. Untuk mendukung aktivitas ini, dan juga untuk mendukung aktivitas perdagangan, maka di kawasan Lasusua dan Kato'i, khususnya di kawasan perkotaannya perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang bisa mengakses dan diakses, baik secara internal (oleh setiap kecamatan dan kota-kota dari orde tertinggi sampai orde terendah di Kabupaten Kolaka Utara) maupun eksternal, dalam rangka meningkatkan frekuensi pemasaran produknya ke luar wilayah Kabupaten Kolaka Utara kedepannya.

Peta rencana struktur ruang kabupaten kolaka utara.

Gambar 4. pola rencana pola ruang



Gambar 5. Peta pola rencana pola ruang



Profil Sanitasi saat ini

- a. Air limbah domestic.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water).Limbah domestik atau sering juga disebut limbah

rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti pada limbah pada umumnya limbah rumah tangga Limbah rumah tangga atau limbah domestic adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit muntaber, diare disentri, typhus, kolera dan penyakit berbagai penyakit lainnya.

Air limbah seharusnya dikelola sebelum dibuang karena akan menimbulkan pencemaran dan mengganggu sanitasi lingkungan. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu, tempat saluran pembuangan dibuat secara sederhana dan jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan kedalaman 10 meter. Kondisi umum pengelolaan air limbah domestik di Kab. Kolaka Utara baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis (Kelembagaan, Kebijakan, Keuangan, PMJK, Media dan Komunikasi serta Penyedia layanan kesantitasian) dapat diuraikan sebagai berikut:

System dan infrastruktur.

a) Capaian akses limbah layanan air limbah domestic

Capaian akses Air Limbah Domestik di Kab. Kolaka Utara, lebih lengkapnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Table capaian akses air limbah domestic.

Table 1. system

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	3,47%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	27,72%
	Akses Layak Bersama	1,52%
C	Akses Belum Layak*	10,79%
BABS Tertutup		
D	BABS di Tempat Terbuka	3,23%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	2,30%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	22,52%
	Akses Layak Bersama	2,28%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	12,36%
C	Belum Layak	0,43%

BABS Tertutup		
D	BABS di Tempat Terbuka	13,32%
Total		100,00%

Berdasarkan Tabel capaian akses air limbah di Kabupaten Kolaka Utara sesuai Instrumen SSK untuk wilayah perkotaan akses aman sebesar 3,47%, akses belum layak 10,79% dan masih terdapat warga yang melakukan praktik BABS ditempat terbuka sebesar 3,23%. Capaian layanan eksisting untuk wilayah perdesaan akses aman 2,3%, akses layak khusus perdesaan (Leher Angsa-Cubluk) 12,36%, akses belum layak 0,43% dan BABS ditempat terbuka sebesar 13,32%.

b) Sub system pengangkutan SPALD setempat.

Gambar 6. sub sistem pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerintah Daerah		
2	Jumlah truk tinja	Unit	1
3	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	4
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	4
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	1
	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	1
1	Swasta		
2	Jumlah truk tinja	Unit	-
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	-
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	-
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber: Instrumen SSK Kolaka Utara 2021

Berdasarkan tabel Sub Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat di Kabupaten Kolaka Utara telah terdapat sarana pengangkutan Truk Tinja sebanyak 1 unit dengan status aset telah diserahkan terimakan dari Balai BPPW Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan jumlah kapasitas 4 m³, volume truck tinja yang dibuang ke IPLT sekali penyedotan 4m³. Namun dalam hal operasionalnya belum maksimal untuk melayani jasa sedot tinja warga dikarenakan jumlah pengguna yang belum banyak dan sosialisasi kepada warga terkait sedot tinja belum tersampaikan dengan baik serta terindikasi tangki septik yang dimiliki warga belum kedap air.

Gambar 7. angkutan truk tinja



Foto 1: Truk Tinja
Foto diambil: 01/07/2021

Foto 2: Truk Tinja
Foto diambil: 01/07/2021

c) Sub- Sistem Pengolahan Lumpur Tinja
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat).

Table 2. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT KOLAKA UTARA	-
2	Status aset	Sudah Serah Terima	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	8
4	Tahun Pembangunan	2018	-
5	Tahun Rehabilitasi	2018	-
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	133	
7	Wilayah layanan terdekat	Km	5
8	Wilayah layanan terjauh	Km	80
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grit chamber - Anaerobic digester - Kolam anaerob-activated sludge-unit desinfeksi - Tidak ada	
2	Kondisi IPLT	Kondisi baik, beroperasi tidak optimal	
3	Kualitas Effluen	1	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Baik	

Kabupaten Kolaka Utara memberikan gambaran bahwa saat ini Kabupaten Kolaka Utara telah memiliki sarana infrastruktur IPLT sebagai wadah pengolahan lumpur tinja yang terletak di desa Totallang dan berada satu lokasi dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Kolaka Utara yang dibangun pada tahun 2018 dengan status aset telah diserahkan dari Balai PPW Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dengan kapasitas IPLT sebesar 8m3/hari.

Gambar 8. foto IPLT



d) Sub system layanan dan pengolahan SPALD – terpusat.

Gambar 9. Sub system layanan dan pengolahan SPALD – terpusat.

Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (PD)	Kapasitas Terpasang (PT)	Tahun Dibangun/Rehabilitasi	Kondisi dan Status Operasional	Lampiran Perizinan Pembiayaan	Preposisi E-Band	Seri Terima Ases
IPALD 1 Desa Pitu	Desa Pitu	30	30	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 2 Desa Lappas-pasi	Desa Lappas-pasi	25	20	2019	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 3 Desa Wawo	Desa Wawo	25	25	2019	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 4 Desa Tolalang	Desa Tolalang	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 5 Desa Puncak Lingsa	Desa Puncak Lingsa	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 6 Desa Batu Ganda	Desa Batu Ganda	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 7 Kelurahan Lalausa	Kelurahan Lalausa	10	0	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 8 Kelurahan Lalausa	Kelurahan Lalausa	25	22	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 9 Desa Tojaji	Desa Tojaji	20	19	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 10 Desa Pihua	Desa Pihua	20	18	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 11 Desa Lalawata	Desa Lalawata	25	25	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 12 Desa Lingsa-niga	Desa Lingsa-niga	25	25	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 13 Desa Lamburo	Desa Lamburo	25	25	2019	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 14 Desa Kaulakulu	Desa Kaulakulu	25	20	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 15 Desa Kamai	Desa Kamai	20	19	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 16 Desa Tambah	Desa Tambah	25	25	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 17 Desa Timu	Desa Timu	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 18 Desa Ngapa	Desa Ngapa	30	30	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 19 Kelurahan Lata	Kelurahan Lata	25	25	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 20 Desa Tumburu	Desa Tumburu	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 21 Desa Sapoha	Desa Sapoha	30	30	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan

Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (PD)	Kapasitas Terpasang (PT)	Tahun Dibangun/Rehabilitasi	Kondisi dan Status Operasional	Lampiran Perizinan Pembiayaan	Preposisi E-Band	Seri Terima Ases
IPALD 22 Desa Witaluh	Desa Witaluh	30	30	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 23 Desa Labund	Desa Labund	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 24 Desa Labund	Desa Labund	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 25 Desa Angato	Desa Angato	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 26 Desa Tanta	Desa Tanta	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 27 Desa Amosa	Desa Amosa	30	30	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 28 Desa Pundiro	Desa Pundiro	25	25	2019	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 29 Desa Pihua	Desa Pihua	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 30 Desa Mitaluano	Desa Mitaluano	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 31 Desa Bawongga	Desa Bawongga	30	30	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 32 Desa Lingsa	Desa Lingsa	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 33 Desa Pasampang	Desa Pasampang	30	30	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 34 Desa Masyanti	Desa Masyanti	30	30	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 35 Desa Kowasa	Desa Kowasa	25	25	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 36 Desa Buak Toggi	Desa Buak Toggi	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 37 Kelurahan Batu Putih	Kelurahan Batu Putih	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 38 Desa Tangkuru	Desa Tangkuru	30	25	2017	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 39 Desa Ponggi	Desa Ponggi	25	25	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 40 Desa Truna	Desa Truna	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 41 Desa Kaman	Desa Kaman	25	25	2018	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 42 Desa Toasa	Desa Toasa	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 43 Desa Pakaka	Desa Pakaka	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan
IPALD 44 Desa Lingsa-niga	Desa Lingsa-niga	25	25	2020	Kondisi baik, beroperasi optimal	Masyarajat	Tidak Diajukan	Sultan

Sumber: Instrumen SKK Kotaka Utara 2021

Gambar 10. foto IPLT



Gambar 11. Cakupan Akses dan Sistem layanan air Limbah Domestik Per Kecamatan.



e) Analisis Gap capaian air limbah

Gambar analisis gapa pencapaian akses air limbah berdasarkan target RPJMN 2020 – 2024.

Gambar 12. analisis Gap pencapaian akses air limbah.

Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target 2024 (%)		Target Jangka Pendek Kabupaten KOLAKA UTARA	Capaian (%) Tahun:2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten KOLAKA UTARA				
Akses Aman	15%	3,0%	10,0%	8,0%	5,8%	4,2%	-2,2%
Akses Layak	90%	81,0%	90,0%	84,0%	72,2%	17,8%	11,8%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	70,0%	58,0%	50,2%	19,8%	-7,8%
Akses Layak Bersama	0%*	0%**	10,0%	6,0%	3,8%	6,2%	2,2%
Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	12,0%	12,4%	-12,4%	-0,4%
Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,2%	-11,2%	-11,2%
BABS Tertutup	0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,6%	-16,6%	-16,6%
BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,6%	-16,6%	-16,6%

Sumber: Instrumen SSK Kolaka Utara 2021

Analisis Gap Pencapaian akses Air Limbah sampai dengan tahun 2024 sesuai target RPJMN sebesar 15%, untuk capaian eksisting akses aman Kabupaten Kolaka Utara sebesar 5,8% akan ditingkatkan menjadi 10% sehingga GAP target yang akan ditingkatkan sebesar 4,2%. Untuk pencapaian akses layak dalam target RPJMN sebesar 90%, capaian eksisting Akses layak Kabupaten Kolaka Utara sebesar 72, 2% akan ditingkatkan menjadi 90% sehingga terdapat GAP target sebesar 17,8%. Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ditempat terbuka Kabupaten Kolaka Utara sebesar 16,6% akan diturunkan menjadi 0% sehingga GAP target penurunan angka BABS -16,6%.

f) Analisis utilitas infrastruktur eksisting.

Table 3. Analisis utilitas infrastruktur eksisting

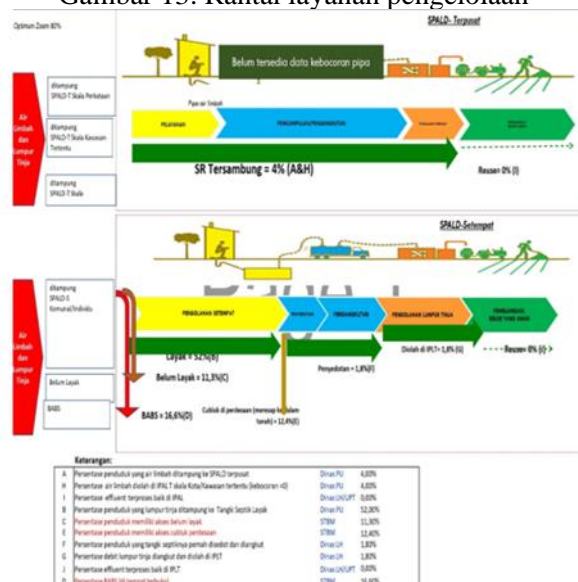
Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	3,38%
Kapasitas penggunaan truk	8,33%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	150,00%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	8,27%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	12,41%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	89%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber : Instrumen SSK Kolaka Utara 2021

Berdasarkan instrument SSK Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021, untuk analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting diperoleh gambaran bahwa persentase kapasitas angkut terhadap IPLT (desain) sebesar 150%, kapasitas Truck Tinja yang dimiliki terhadap total kebutuhan Rumah Tangga pengguna sebesar 8,27% dan kapasitas IPLT terhadap total RT sebesar 12,41% dan untuk persentase penggunaan SPALDT permukiman sebesar 89%.

g) Analisis rantai layanan pengelolaan air limbah domestik.

Gambar 13. Rantai layanan pengelolaan



Sumber : Instrumen SSK Kab. Kolaka Utara 2021.

Analisis rantai layanan pengelolaan air limbah domestik menunjukkan bahwa Rantai Layanan SPALD – Terpusat di Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan sejumlah 4 % warga tersambung dengan SPALD, sedangkan untuk SPALD setempat diperoleh gambaran bahwa jumlah warga yang masih melakukan praktik BABS sebesar 16,6%, akses belum layak 11,3 %, kases layak 2% dan tinja yang disedot dan diolah di IPLT sebesar 1,8%.

Strategi pengembangan sanitasi.

Strategi Pengembangan Sanitasi Permukiman dapat diartikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan dan sebagai langkah, maka perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Definisi tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang telah ditetapkan, dalam hal ini strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis sesuai dengan permasalahan sanitasi yang telah diidentifikasi.

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi sanitasi kabupaten. Kabupaten Kolaka Utara merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu utama / strategis yang dihadapi pada saat ini. Paparan isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kabupaten ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; komponen air limbah domestik, komponen persampahan, komponen drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (prohisan).

- Air limbah domestic
 - a. Menuntaskan angka BABS baik diperkotaan maupun diperdesaan dengan melakukan pemicuan dan pelibatan semua organisasi pemerintah daerah. Dalam rangka pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kolaka Utara utamanya penuntasan praktik BABS warga dilakukan dengan adanya pembagian desa/kelurahan binaan oleh Istansi yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Pembagian ini dimaksudkan agar OPD dapat melakukan pembinaan sekaligus mengarahkan dan membantu desa yang masih melakukan praktik BABS untuk tidak lagi melakukan hal tersebut.
 - b. Meningkatkan Akses Layanan Air Limbah (onsite individu dan komunal layak dan Aman). Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kolaka Utara, peningkatan akses layanan sangat diperlukan dalam membangun sarana infrastruktur Air Limbah. Pembangunan sarana infrastruktur air limbah domestik didorong pada peningkatan cakupan layanan akses layak dan akses aman, berdasarkan target yang telah ditetapkan yakni 10% akses layak dan 90% akses aman. Untuk itu dibutuhkan berbagai sumber pendanaan tidak hanya pendanaan yang bersumber dari pemerintah baik APBN maupun APBD, tetapi juga partisipasi sektor swasta melalui dana CSR dan masyarakat sangat diperlukan.
 - c. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan Kapasitas SDM dengan pelatihan, melalui dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pengelolaan Air Limbah domestik akan berjalan dengan baik apabila terdapat kelembagaan khusus yang menangani dalam hal pengelolaannya. OPD tidak lagi berfungsi sebagai operator tetapi lebih sebagai regulator dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kegiatan. Dalam hal optimalisasi infrastruktur IPLT yang ada dibutuhkan sebuah kelembagaan berupa UPTD sehingga nantinya dapat memaksimalkan keberfungsian dari infrastruktur tersebut. Optimalisasi keberfungsian IPLT dalam waktu dekat dilakukan dengan cara mewajibkan penyedotan bagi ASN dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - d. Melibatkan media dalam hal sosialisasi pengelolaan Air Limbah Domestik dalam upaya meningkatkan kegiatan komunikasi dan sosialisasi dalam Pengelolaan Air limbah Domestik. Kegiatan komunikasi dan sosialisasi dalam Pengelolaan Air limbah domestik dimasyarakat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran warga dalam mengurangi resiko-resiko pencemaran lingkungan akibat air limbah domestik serta kesadaran dalam pengelolaan (O&M) sarana umum air limbah (Jamban Umum, MCK, MCK++, Tangki Septik Komunal dsb).
- Perampahan
 - a. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. Peraturan daerah Nomor 3 tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Kolaka Utara dianggap perlu direvisi agar dapat mengakomodir seluruh kebutuhan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kolaka Utara baik secara teknis maupun non teknis. Kebijakan pengelolaan persampahan dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas Bank sampah yakni gerakan satu desa /kelurahan satu bank sampah dan pengelolaannya bekerja sama dengan pengurus PKK, pelatihan kelompok pengelola TPST (TPS3R), mengadakan lomba pengurangan dan pemilahan sampah serta Upaya peningkatan pengelolaan TPA dengan melakukan perluasan jaringan pemanfaatan gas metana TPA dan menjadikan TPA sebagai kawasan obyek wisata berwawasan lingkungan.
 - b. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka membenahan manajemen pengelolaan Persampahan melalui pembentukan UPTD

pengelolaan Persampahan. Sebuah kelembagaan yang baik disertai SDM yang kompeten di bidang pengelolaan persampahan dapat meningkatkan kemampuan layanan persampahan kepada masyarakat sehingga dapat menurunkan volume sampah yang ada atau belum terangkut. Dalam rangka penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kolaka Utara di butuhkan UPTD yang nantinya akan mengelola TPA dan Bank Sampah. Dengan adanya UPTD ini diharapkan sampah dapat tertangani dan terkelola dengan baik, dimana sampah dari user interface atau titik timbulan sedapat mungkin dikelola melalui bank sampah, TPS3R sebelum dibawah ke TPA.

- c. Mengembangkan TPS3R disetiap Kecamatan. Pengelolaan persampahan dimasing-masing kecamatan dilakukan dengan cara pembangunan sarana TPS3R dalam rangka pengurangan timbulan sampah sekaligus pemanfaatan Kembali sampah organic yang ada melalui kompos. TPS3R yang dibangun tidak hanya melayani satu desa/kelurahan akan tetapi bisa lebih dari itu yang diharapkan nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya TPST.
- Drainase
 - a. Menyiapkan rencana induk sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan dan database sistem drainase. Rencana induk merupakan rujukan utama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembangunan infrastruktur drainase yang memuat integrasi antara drainase primer, Sekunder dan taersier yang didukung dengan basedata drainase dan kawasan rawan genangan, sehingga permasalahan genangan dan banjir dapat terselesaikan.
 - b. Meningkatkan cakupan layanan drainase perkotaan melalui berbagai sumber pendanaan. Wilayah cakupan layanan yang menjangkau seluruh Kawasan kota akan dapat mengatasi berbagai persoalan genangan dan banjir yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara.
 - c. Memaksimalkan peran aktif stakeholder dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan komunikasi dan sosialisasi dalam Pengelolaan Drainase. Pengelolaan drainase memerlukan peran serta masyarakat untuk turut serta menjaga dan mengelola drainase sehingga dapat disinkronkan dengan pembangunan system draianse yang dibangun oleh pemerintah.
 - d. Mengembangkan perencanaan system drainase yang terintegrasi dan komprehensif. Perencanaan system drainase yang saling terintegrasi antar wilayah dan Kawasan dapat menjadi kerangka/guideline yang jelas hingga 5 (lima) tahun kedepan sebagai solusi dari berbagai persoalan genangan dan banjir.

Untuk kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan dibutuhkan biaya sebesar Rp 118.453.000.000,- yang dibagi menjadi 2 sub sektor (Air Limbah) dan STBM yang terdiri atas sub sektor air limbah sejumlah Rp 65.737.000.000, sub sektor persampahan sejumlah Rp 51.447.000.000,-, dan STBM Rp 1.269.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 14. Rekapitulasi Indikasi kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	15.846	12.223	12.723	12.723	12.222	65.737
2	Persampahan	15.888	8.967	8.967	8.519	9.116	51.447
3	STBM	245	285	293	220	225	1.269
Jumlah (a)		31.979	21.476	21.973	21.462	21.563	118.453
Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi (b)		10.209	11.805	13.650	15.784	18.251	69.699
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)		9.509	10.461	12.364	13.317	14.269	59.921
Gap 1 (a-b)		21.770	9.671	8.323	5.678	3.312	48.754
Gap 2 (a-c)		22.470	11.015	9.609	8.145	7.294	58.533

Hasil Perhitungan Funding Gab untuk 5 Tahun berdasarkan Program Kegiatan Sektor Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 Kebutuhan pendanaan sebesar Rp.31.978.690.000,- dan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp.4.787.770.000,- dengan selisih Gab pendanaan sebesar Rp.27.196.000.000,- dengan selisih persentase Gab 85%. Total Kebutuhan pendanaan sebesar Rp.118.453.000.000,- dan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp.38.335.270.000,- dengan selisih Gab pendanaan sebesar Rp80.117.000.000,- atau sebesar 68% yang diharapkan pendanaannya dari sumber pendanaan lain baik APBD Provinsi, APBN, DAK, Swasta dan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada.

gambar 15. Rekapitulasi Indikasi kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran.

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	31.978,69	21.475,30	21.972,36	21.462,21	21.564,16	118.453
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	4.782,77	8.345,80	8.848,10	8.330,80	8.027,80	38.335,27
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	27.196	13.130	13.124	13.131	13.536	80.117
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	85%	61%	60%	61%	63%	68%

Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi pada sub sektor Air Limbah, Persampahan dan STBM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan sumber anggaran APBD Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp 38.335.000.000,- berdasarkan sumber pendanaan DAK sebesar Rp 33.305.000.000,- berdasarkan sumber pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp .0,- sedangkan untuk Sumber Pendanaan APBN Sebesar Rp 11.650.000.000,- dan untuk sumber pendanaan non pemerintah (CSR) dan Masyarakat Sebesar Rp 16.530.000.000, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 16. Rekapitulasi Indikasi kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran.

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2022	2023	2024	2025	2026	
A. Pemerintah							
1	APBD Kab/Kota	4.782,77	8.345,80	8.848,10	8.330,80	8.027,80	38.335
2	DAK	7.929	5.785	6.414	5.796	7.381	33.305
3	APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-
4	APBN	10.200	625	-	625	-	11.450
Jumlah A		22.911,77	14.755,80	15.262,10	14.751,80	15.408,80	83.090
B. Non-Pemerintah							
1	CSR Swasta	750	750	750	750	750	3.750
2	Masyarakat	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	12.750
Jumlah B		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	16.510
C. Daftar Tunggu							
Daftar Tunggu		3.405	3.410	3.410	3.410	3.417	17.052
Total (A + B + C)		29.616,77	21.465,80	21.972,10	21.461,80	22.125,80	116.652

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

Kebutuhan biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Perkiraan Pendanaan Sanitasi ini akan memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan Kabupaten Kolaka Utara dalam pendanaan sektor sanitasi, dimana analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten. Akan terlihat trend pendanaan belanja sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- APBD Kabupaten

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah	327,80	1.607,80	2.107,80	2.047,80	1.607,80	7.759
2	Persampahan	4.388	6.637	6.637	6.199	6.396	30.257
3	STBM	66,97	101	103,30	24	24	319,27
Jumlah		4.783	8.346	8.848	8.271	8.028	38.335

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

- APBD Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah	-	-	-	-	-	-
2	Persampahan	-	-	-	-	-	-
3	STBM	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

- APBN

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah	1.500	300	-	-	-	1.800
2	Persampahan	10.200	625	0	625	0	11.450
4	STBM	-	-	-	-	-	-
Jumlah							13.250

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

- DAK

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah	6.501	3.955	3.955	3.955	4.510	22.876
2	Persampahan	1.250	1.645	2.270	1.645	2.670	9.480
3	STBM	177,92	184,50	189,26	196,41	201,36	949,45
Jumlah		7.929	5.785	6.414	5.796	7.381	33.305

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah. Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan sumber pendanaan Sanitasi Masyarakat dan kontribusi swasta sebesar Rp 16.530.000.000.

- Potensi kontribusi swasta / CSR Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. di lima sector sanitasi sebesar Rp 3.750.000.000.

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah	750	750	750	750	750	3.750
2	Persampahan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		750	750	750	750	750	3.750

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

- Potensi kontribusi masyarakat Sedangkan untuk potensi pendanaan melalui partisipasi masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan dibutuhkan total biaya sebesar Rp. 12.760.000.000,- yaitu untuk pembiayaan subs ektor air limbah dan persampahan. lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2	Persampahan	50	50	50	50	50	250
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
4	STBM	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	12.760

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

- Program kegiatan belum memiliki pendanaan Karena keterbatasan anggaran Pendapatan Daerah untuk melengkapi kebutuhan ini Kabupaten Kolaka Utara terdapat kegiatan yang belum memiliki akses pendanaan yakni sub sektor air limbah domestik sebesar 17.052.000.000.

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	3.405	3.410	3.410	3.410	3.417	17.052
2	Persampahan	-	-	-	-	-	-
3	STBM	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3.405	3.410	3.410	3.410	3.417	17.052

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kolaka Utara, 2021

Capaian Strategis Program Kegiatan Sanitasi

No	Sub Kegiatan	Rencana Berasaskan SSK Sebelumnya			Realisasi Berasaskan SSK Sebelumnya		
		Indikator Inisialisasi (Pq)	Output (E=H/Kegiatan)	Outcome (Lini)	Indikator Inisialisasi (Pq)	Output (E=H/Kegiatan)	Outcome (Lini)
A Air Limbah Domestik							
1	Pencapaian Monevian Sistem Air Limbah	450.000.000	1	132.531	-	-	-
2	Pencapaian Outline plan Sistem Air Limbah	500.000.000	1	132.531	-	-	-
3	Pencapaian Perakita Pengolahan Air Limbah	300.000.000	1	132.531	-	-	-
4	Pembangunan MCK Utaman	1.200.000.000	8	-	-	-	-
5	Pembangunan MCK ++	9.000.000.000	20	-	-	-	-
6	Pembangunan Tangki Sapit Individual	3.200.000.000	8	-	-	-	-
7	Pembangunan Ipl	2.100.000.000	7	-	-	-	-
8	Pembangunan IFLT	3.000.000.000	1	132.531	-	-	-

No	Sub Kegiatan	Rencana Berasaskan SSK Sebelumnya			Realisasi Berasaskan SSK Sebelumnya		
		Indikator Inisialisasi (Pq)	Output (E=H/Kegiatan)	Outcome (Lini)	Indikator Inisialisasi (Pq)	Output (E=H/Kegiatan)	Outcome (Lini)
9	Pencapaian Tah Taja	500.000.000	1	132.531	-	-	-
B Puncampahan							
1	Monevian Puncampahan	185.000.000	1	132.531	-	-	-
2	Pencapaian Perakita Pengolahan Puncampahan	150.000.000	1	132.531	-	-	-
3	Pelatihan Puncampahan Sampah 3R	750.000.000	15	132.531	-	-	-
4	Pembangunan TPST dengan Metode 3R	7.800.000.000	21	132.531	-	-	-

Tabel 4.4 Matriks Tahap Pelaksanaan dan Jadwal Monevian Implementasi SSK 2021-2026

No	Uraian Kegiatan	Perencanaan												Pencapaian Tahap dan Dokumentasi	Pencapaian Tahap dan Dokumentasi	Monevian	Evaluasi Puncampahan (Sampah 3R)	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
1	Input Monevian													Selesai	Selesai	Selesai	September	Duga PNP
2	Input Monevian													Selesai	Selesai	Selesai	Agustus	Duga PNP
3	Input Monevian													Selesai	Selesai	Selesai	Agustus	Duga PNP
4	Input Monevian													Selesai/Selesai	Selesai/Selesai	Selesai/Selesai	Agustus	Duga PNP
5	Input Monevian													Selesai	Selesai	Selesai	Agustus	Duga PNP
6	Output Monevian													Selesai/Selesai	Selesai/Selesai	Selesai/Selesai	Agustus	Duga PNP

KESIMPULAN

Kabupaten Kolaka Utara telah berupaya secara terstruktur dalam memperbarui Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2021 sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Evaluasi terhadap kondisi sanitasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pencapaian dalam pembangunan infrastruktur seperti IPLT dan truk tinja, penggunaan serta efektivitas operasionalnya masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses air limbah domestik yang aman dan tinggi angka buang air besar sembarangan (BABS). Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

SSK Implementasi
Kabupaten Kolaka Utara 2021.